

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah sebuah upaya peneliti dalam membuat suatu penelitian dengan mencari perbandingan sebagai sumber informasi untuk menemukan inspirasi baru untuk melakukan penelitian selanjutnya oleh penulis. Penelitian terdahulu yang pernah dibuat merupakan bisa menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian selanjutnya, hal ini dilakukan guna memperkaya teori dalam mengkaji suatu penelitian yang diteliti. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu dengan mengangkat tema serupa yang pernah dibuat dan terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis dengan mencantumkan hasil-hasil beberapa penelitian terdahulu yang pernah dibuat, sebagai berikut:

Yang pertama penelitian Sandrina Salsabila (2018),¹⁰ *“Reorientasi Kebijakan Migrasi Terbuka Dalam Sistem Negara Kesejahteraan Swedia Pada Masa Krisis Migran Eropa 2015”*, penelitian ini adalah sebuah penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data dari sumber informasi seperti artikel-artikel, dan buku-buku yang mengenai tema tersebut yang mengangkat studi kasus krisis

¹⁰ Salsabila Sandrina, “Reorientasi Kebijakan Migrasi Terbuka dalam Sistem Negara Kesejahteraan Swedia Pada Masa Krisis Migran Eropa 2015”. e- Journal Hubungan Internasional, 2018.

pengungsi di eropa wilayah skandinavia (swedia). Studi ini dirancang untuk menganalisis data milik pemerintah tentang kontribusi sistem kesejahteraan sosial terhadap belanja publik dan pendapatan negara untuk imigran, terutama pencari suaka atau pengungsi, sementara masuknya pengungsi imigran pada tahun 2015 menciptakan ketegangan di Amerika Serikat. Kesejahteraan Sosial. Ini menghambat keberlanjutan sistem. Lebih lanjut, analisis terhadap retorika politisi dari partai-partai paling berpengaruh pada 2015 dan 2016 menunjukkan bahwa masuknya imigran mengancam identitas negara kesejahteraan Swedia. Perubahan persepsi tentang keimigrasian, sehingga perubahan kebijakan keimigrasian terkadang terbatas pada saat krisis.¹¹

Penelitian milik Sandrina Salsabila ini dirujuk karena menganalisis studi kasus pengungsi di eropa wilayah skandinavia (Swedia), dan berbagai faktor karena persepsi tentang imigran, sehingga adanya perubahan kebijakan luar negeri Swedia terhadap imigran pada saat krisis.

a. Persamaan dengan penelitian saat ini

Persamaan penelitian Sandrina Salsabila dengan penelitian saat ini adalah bagaimana Swedia mempertahankan identitas negaranya dalam menghadapi krisis imigran yang masuk ke Swedia dengan melakukan sebuah kebijakan baru terhadap imigran. Selain itu adanya faktor lain yang membuatnya semakin yakin dengan perubahan kebijakan tersebut yaitu: ekonomi, politik, sosial dan budaya. Jenis penelitian yang

¹¹ Salsabila Sandrina, "Reorientasi Kebijakan Migrasi Terbuka dalam Sistem Negara Kesejahteraan Swedia Pada Masa Krisis Migran Eropa 2015". e- Journal Hubungan Internasional, 2018.

dilakukan juga sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan metode penelitian yang sama yakni studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data melalui dokumen resmi pemerintah, jurnal, serta berita terkait topik penelitian.

b. Perbedaan dengan penelitian saat ini

Perbedaannya adalah dalam penelitian Sandrina Salsabila objek kajiannya menganalisis data milik pemerintah tentang kontribusi sistem kesejahteraan sosial terhadap belanja publik dan pendapatan negara untuk imigran, kenaikan pajak pemerintah pusat Swedia, dan retorika politisi dari partai-partai domestik yang paling berpengaruh. Sedangkan penelitian saat ini lebih mengedepankan perubahan kebijakan sebelumnya dan setelahnya, upaya dan faktor apa saja yang sudah dilakukan Swedia terhadap imigran.

Selanjutnya penelitian Putri Larasati (2018), *“Perspektif Feminisme Terhadap Perubahan Kebijakan Swedia Terkait Krisis Pengungsi Periode 2014-2017”*, Metode kualitatif digunakan pada penelitian makalah ini, dan data dikumpulkan melalui voting dan pencarian literatur dari buku, jurnal, dan artikel. Berdasarkan fakta bahwa Swedia merupakan negara pertama di dunia yang membentuk pemerintahan feminis dan adanya isu-isu perempuan terkait pengungsi, makalah ini akan dikaji dengan menggunakan konsep teori besar feminis liberal, teori keamanan feminis berat, dan kebijakan luar negeri feminis lakukan krisis Swedia. Dalam studi ini, kami menemukan dua alasan mengapa negara Swedia merubah kebijakan migran dari kebijakan terbuka (*Open Door*

Policy jadi U-Turn Policy). Ini tentang mendorong penggunaan isu-isu gender sebagai kecenderungan anti-imigran dan mengatasi tantangan dalam menilai sistem imigrasi, hak perempuan dan anak perempuan.¹²

Penelitian milik Putri Larasati ini dirujuk karena menganalisis kebijakan migrasi dari terbuka menjadi kebijakan putar arah (*Open Door Policy to U-Turn Policy*). Dalam penelitian ini menemukan bahwa adanya dua alasan mengapa negara Swedia mengubah kebijakannya.

a. Persamaan dengan penelitian saat ini

Persamaan penelitian Putri Larasati dengan penelitian saat ini adalah bagaimana Swedia mengubah kebijakan luar negerinya terhadap kebijakan imigran dari terbuka menjadi kebijakan putar arah (*Open Door Policy to U-Turn Policy*). Perubahan ini karena adanya dorongan publik Swedia dan agenda evaluasi sistem keimigrasian demi menjaga melindungi negaranya. Jenis penelitian yang dilakukan juga sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan metode penelitian yang sama yakni studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data melalui dokumen resmi pemerintah, jurnal, serta berita terkait topik penelitian.

b. Perbedaan dengan penelitian saat ini

Perbedaannya adalah dalam penelitian Putri Larasati objek kajiannya lebih mengangkat isu feminisme dan menganalisis isu-isu perempuan

¹² Larasati Putri, "Perspektif Feminisme Terhadap Perubahan Kebijakan Swedia Terkait Krisis Pengungsi Periode 2014-2017", 2018.

terkait. Dua alasan yang membuat Swedia mengubah kebijakannya tentang mendorong isu gender dan mengatasi tantangan hak perempuan dan anak perempuan.

Dan yang terakhir penelitian Tiffany Setyo Pratiwi (2018), "*Sekuritisasi Penanganan Isu Pengungsi di Swedia: Berhasil atau Gagalkan?*", Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan konsep sekuritisasi. Studi ini mengulas sekuritisasi pengungsi Uni Eropa di Swedia. Menurut Tiffany, keberhasilan sekuritisasi pengungsi Swedia disebabkan beberapa faktor. Faktor kunci dukungan akan datang dari pemangku kepentingan utama Swedia yang telah memenangkan agar mempengaruhi warga atau masyarakatnya untuk menganggap serius implikasi dari masalah pengungsi Swedia. Tentu saja, ini karena adanya beberapa dampak sosial dan politik yang cukup kuat pada model sosial Swedia dan cara pandang pengungsi. Oleh karena itu, semua sepakat bahwa pergerakan pengungsi harus diawasi secara ketat agar tidak mengancam identitas dan keamanan nasional Swedia.¹³

Penelitian Tiffany Setyo Pratiwi ini dirujuk karena menganalisis penanganan isu pengungsi di Swedia, adanya faktor dukungan datang dari yang memegang kendali utama Swedia yang memenangkan agar warga atau masyarakat menganggap serius implikasi dari masalah pengungsi di Swedia.

- a. Persamaan dengan penelitian saat ini

¹³ Tiffany Setyo Pratiwi, 2018. "Sekuritisasi Penanganan Isu Pengungsi Di Swedia Berhasil atau Gagalkan?"

Penelitian Tiffany Setyo Pratiwi dengan penelitian saat ini adalah keberhasilan perubahan dalam mengubah kebijakan luar negerinya terhadap imigran disebabkan faktor dari pemerintah, dan adanya beberapa dampak sosial. Pergerakan pengungsi juga harus diawasi secara ketat agar tidak mengancam identitas dan keamanan negara Swedia. Jenis penelitian yang dilakukan juga sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan metode penelitian yang sama yakni studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data melalui dokumen resmi pemerintah, jurnal, serta berita terkait topik penelitian.

b. Perbedaan dengan penelitian saat ini

Perbedaannya adalah dalam penelitian Tiffany Setyo Pratiwi lebih menganalisis keamanan atau sekuritisasi yang dilakukan Swedia dan pemangku utama digunakan sebagai kunci untuk mempengaruhi warga atau masyarakat dalam menangani masalah pengungsi di Swedia.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy*)

Kebijakan luar negeri adalah tindakan otoritatif yang diambil oleh pemerintah untuk mempertahankan aspek yang diinginkan dari lingkungan internasional atau mengubah yang tidak diinginkan. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kebijakan untuk luar negara mencakup pemasukan dan peraturan digunakan maupun diadopsi oleh negara untuk tujuan hubungan mereka dengan eksternal aktor, termasuk aktor dan non-negara. Kebijakan luar negeri ini diperhitungkan lebih tepat dan jelas terfokus pada pemecahan

masalah dan mendorong perubahan di lingkungan internasional.¹⁴ Kebijakan luar negeri ini didasarkan pada hitungan jelas dan tujuan ketika menghadapi masalah maupun menanggung fasilitas dalam perubahan lingkungan internasional.¹⁵ Dalam uraian ini, kepentingan nasional berfungsi sebagai tujuan maupun kepentingan yang utama untuk para pengambil kebijakan/ keputusan terlebih sebelum adanya rumusan dan mendefinisikan posisi atau tindakan suatu negara. Untuk itu, semua tahapan kebijakan luar negeri harus berbasis kepentingan nasional dan diarahkan pada pencapaian dan perlindungan dari apa yang diklasifikasikan atau diidentifikasi seperti itu.¹⁶ Suatu tahapan akhirnya, kebijakan luar negeri ini dilihat gunanya untuk seperangkat Formula untuk nilai-nilai, sikap, arah dan tujuan melindungi, melestarikan, dan mempromosikan kepentingan nasional di panggung internasional.¹⁷ Negara juga berbeda. Namun, kepentingan negara adalah kepentingan utama negara, yang merupakan prinsip kebijakan komunikasinya dengan negara-negara asing.

Menurut William D. Coplin, tiga faktor penentu atau memengaruhi suatu keputusan di luar negeri adalah politik dalam negeri, ekonomi, militer,

¹⁴ Vinsensio Dugis. "Explaining Foreign Policy Change", dalam Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik (Surabaya: Universitas Airlangga, 2008). Hlm.101.

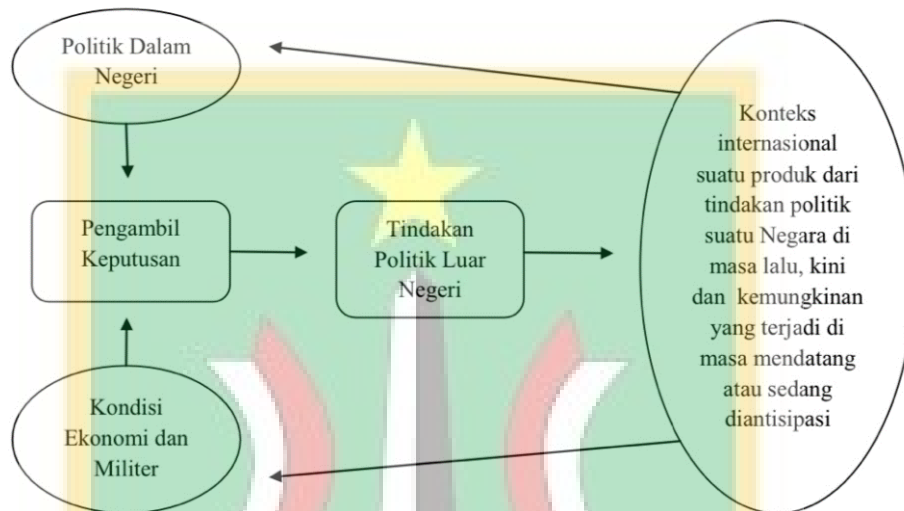
¹⁵ George Modelski, "A Theory of Foreign Policy"; Jonathan Wilkenfeld, dkk. 1980. "Foreign Policy Behavior, the Interstate Behavior Analysis Model"; K.J. Holsti. 1983. "International Politics, A Frameworks for Analysis"; dalam Vinsensio Dugis. "Explaining Foreign Policy", 1962.

¹⁶ May Rudy, "Study Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin.

¹⁷ Yanyan Mochammad Yani, "Politik Luar Negeri", melalui http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf. 2007.

dan urusan internasional.¹⁸ Hal ini ditunjukkan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 2.2.1 Determinan William D. Coplin



Sumber: (Coplin, 1992)

Kebijakan luar negeri belum ditetapkan, tetapi dapat diubah untuk mencapai tujuan atau manfaat yang diharapkan.¹⁹ Ada dua jenis perubahan dalam kebijakan luar negeri. Perubahan pertama adalah perubahan akses pemerintah. Bentuk pemerintahan terkait dengan kebijakan luar negeri, yang sering dibicarakan oleh mantan pejabat. Kedua, jika pemerintah memutuskan untuk mengubah arah kebijakannya, kebijakan tersebut

¹⁸ William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, Bandung: Sinar Baru, 1992.

¹⁹ Vinsensio Dugis. "Explaining Foreign Policy Change", dalam Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik (Surabaya: Universitas Airlangga, 2008). Hlm.103.

berubah. Dalam hal ini, perubahan kebijakan berfokus pada perbaikan kebijakan sebelumnya (*self correcting*).²⁰

Pertimbangkan politik dalam negeri pertama dan terutama. Minat dalam politik dalam negeri terkait dengan perumusan situasi politik internal dan implementasi kebijakan luar negeri. Kondisi politik yang tidak menguntungkan membuat kebijakan luar negeri lebih dirahasiakan. Situasi ini tidak menguntungkan karena kemungkinan menerima gangguan dari luar.

Kedua, kondisi ekonomi dan militer. Pada saat yang sama, dinyatakan bahwa kemampuan ekonomi dan militer satu negara dapat mempengaruhi interaksi dengan negara lain.²¹ Suatu negara harus memiliki kapasitas dan ketersediaan sumber daya untuk menghasilkan kapasitas yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan luar negeri geografisnya, seperti sumber daya alam. Mengekspor sumber daya alam ke negara-negara yang tidak memiliki barang-barang tersebut akan meningkatkan kerja sama di antara kedua negara mengembangkan interaksi.

Ketiga adalah adanya suatu latar belakang internasional. Dalam pertimbangan ini maka akan merujuk, apakah ada waktu tertentu, situasi politik internasional akan berdampak. tindakan dan tindakan suatu Negara

²⁰ Vinsensio Dugis. Op. Cit, hlm.103

²¹ Ibid

di dalamnya. Menurut Coplin, ada tiga faktor amat berguna dalam konteks internasional, berbagai berikut disebutkan: geografi, ekonomi, dan politik.

Lingkup internasional suatu negara terdiri dari beberapa lokasi bias karena adanya geografis yang berbeda yang saling berhubungan dengan negara lain dalam sistem internasional. Mengingat konteks internasional, terutama faktor geografis, ia memiliki pengaruh penting pada perumusan kebijakan luar negeri yang terkait dengan perbatasan. Menurut Steia N. Stein, perbatasan lebih seperti sistem daripada garis yang memisahkan suatu negara. Tetapi juga berfungsi sebagai daerah, koridor, dan perbatasan yang bertentangan secara politik dan budaya. Perbatasan juga merupakan pusat ekonomi, mempengaruhi hubungan luar negeri, mencerminkan nilai-nilai (ketakutan dan ancaman) dan mengarah pada perang.²² Dengan demikian, langkah-langkah keamanan diperlukan untuk melindungi perimeter, terutama terhadap ancaman eksternal. Faktor ekonomi juga berperan penting dalam menentukan kebijakan luar negeri. Melalui arus barang dan jasa, kita dapat mempengaruhi ketergantungan antar negara. Seperti politik, dinamika politik satu negara dapat mempengaruhi hubungannya dengan negara lain. Misalnya, berbagai negara demokrasi juga cenderung menjalin kemitraan politik dengan negara-negara demokrasi.²³

²² Steia N Stein, *Border Security: A Conceptual Model Of Complexity*. Monterey, California: Naval Postgraduate School, 2013.

²³ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Sinar Baru, Bandung, 1992.

- a. Teori menurut William D. Coplin digunakan oleh penelitian saat ini yaitu teori Kebijakan Luar Negeri. Kebijakan Luar negeri merupakan tindakan otoratif untuk mempertahankan aspek yang diinginkan dari lingkungan internasional atau mengubah yang tidak diinginkan. Kebijakan Luar Negeri sangat penting karena lebih tepat dan jelas pada pemecahan kasus ini, terlebih ada tiga faktor penentu menurut William D. Coplin untuk menentukan suatu keputusan di luar negeri yaitu; politik dalam negeri, ekonomi, militer dan urusan internasional.
- b. Teori Kebijakan Luar Negeri untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan Swedia dalam mengatasi krisis imigran di Eropa, karena menyebabkan berbagai masalah domestik yang tak terbendung lagi, dengan itu maka Swedia harus membuat kebijakan baru.

2.2.2 Kepentingan Nasional (*National Interest*)


Menurut Hans J Morgenthau, kepentingan nasional meliputi: Pertama, perlindungan identitas fisik dalam arti keutuhan wilayah dapat dipertahankan. Kedua, perlindungan identitas politik dalam arti tatanan ekonomi dan politik dapat dipertahankan. Ketiga, perlindungan budaya dalam arti linguistik dan sejarah dapat dilestarikan. Kepentingan nasional suatu negara adalah hasil yang dicapai oleh pembuat kebijakan sehingga kepentingan nasional suatu negara dapat berbeda atau bahkan saling bertentangan. Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa.

Bagi Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional menandakan

berbagai hal yang secara logika umum dalam isi, kekuasaan dan keuntungan sebagai instrumen, dan sekaligus tujuan kegiatan politik internasional, sehingga konsep tersebut merupakan tradisi politik dan ditentukan oleh budaya. Politik luar negeri ditentukan oleh negara yang bersangkutan.

Menurut Hans J. Morgenthau, bahwa kepentingan nasional merupakan suatu kemampuan minimal suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik dan budayanya dari campur tangan negara lain. Dalam tinjauan ini, para pemimpin nasional memperoleh kebijakan khusus untuk negara-negara lain yang bekerja sama atau menentang. Pendekatan Morgenthau tentu cukup terkenal untuk dijadikan sebagai model utama bagi studi politik internasional setelah Perang Dunia II. Morgenthau mengatakan bahwa kepentingan nasional negara mana pun adalah kekuatannya. Artinya, segala sesuatu yang memungkinkan satu negara untuk membangun dan mempertahankan kontrol atas negara. Tujuan terkait aspirasi adalah keamanan (termasuk kelangsungan hidup nasional dan kebutuhan teritorial) dan kemakmuran (*prosperity*), di mana kepentingan nasional tetap relatif sama di antara semua bangsa atau masyarakat, dan dasar untuk merumuskan atau menentukan kepentingan nasional Negara (*national interest*).²⁴ Kepentingan nasional merupakan tujuan utama dan akhir para pengambil keputusan di dalam negeri untuk merumuskan atau merumuskan kebijakan luar negeri.

²⁴ Jemadu Aleksius. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 67-69

- 
- a. Konsep menurut Hans J. Morgenthau digunakan oleh penelitian saat ini yaitu Konsep Kepentingan Nasional. Kepentingan Nasional sangat penting karena untuk melindungi identitas fisik/ keutuhan wilayah, identitas ekonomi dan politik, perlindungan budaya. Pendekatan ini dijadikan sebagai kekuatannya, karena setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda bahkan bisa saling bertolak belakang. Kepentingan Nasional merupakan tujuan utama dan akhir dari pengambilan keputusan dalam negeri untuk rumusan kebijakan baru
- b. Konsep Kepentingan Nasional digunakan peneliti untuk menganalisis bagaimana Swedia dalam melindungi atau mempertahankan negaranya menghadapi kasus krisis imigran yang terjadi ini, serta mendorong negara-negara anggota UE lainnya untuk menerima imigran agar meringankan beban Swedia.

2.2.3 Regionalisme (*Regionalism*)

Dalam ilmu hubungan internasional, regionalisme merupakan faktor penting. Dengan kemajuan proses globalisasi, dunia menjadi lebih kecil dan lebih kecil, tanpa batas negara, dan persatuan dan agregasi regional telah muncul di bidang ekonomi, masyarakat, budaya, dan pertahanan negara.

Pengertian dari region suatu wilayah yang pasti teridentifikasi walaupun untuk wilayah tersebut relatif tergantung konteks waktu, selain itu ada suatu unsur yang mendorong identifikasi diri faktor searah dan geografis dan aktifitas yang dilakukan. Faktor penting untuk membuat

'field' Regionalisme secara harfiah berasal dari kata region dan doktrin atau isme.

Dalam hubungan internasional, istilah region mengacu pada unit terkecil suatu negara, dan region mengacu pada dua atau lebih negara yang berdekatan secara geografis. Joseph S. Jr. Nye mendalilkan bahwa regionalisme adalah wilayah-wilayah dalam wilayah yang saling berhubungan berdasarkan geografi dan saling ketergantungan. Mengenai pandangan ini, Joseph S. Jr. Nye mengatakan bahwa kedaerahan adalah daerah yang dibentuk atas dasar pembentukan daerah.²⁵

- a. Teori menurut Joseph S. Jr. Nye digunakan oleh peneliti saat ini yaitu Regionalisme. Regionalisme merupakan faktor penting dalam proses kemajuan globalisasi, region merupakan unit terkecil suatu negara, dan mengacu pada dua negara atau lebih yang berdekatan secara geografis. Wilayah yang berdekatan ini akan saling terhubung dan saling ketergantungan berdasarkan geografis
- b. Teori Regionalisme digunakan peneliti untuk menganalisis bahwa Swedia merupakan negara yang terletak di wilayah atau benua Eropa bagian skandinavia, dan termasuk sebagai negara anggota Uni Eropa yang mendapatkan dampak adanya krisis imigran yang terjadi di Eropa.

²⁵ Perwita dan Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Remaja Rosdakarya. Ambarwati dan Subarno Wijatmadja. 2016.

2.3 Kerangka Pemikiran

